

THE DEVELOPMENT OF SHARIA SOUTHEAST ASIA INDUSTRY: THE POLITICAL ECONOMIC APPROACH

Ayu Yuningsih, Disfa Lidian Handayani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Indonesia
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211, Indonesia
email: ayuyuningsih92@gmail.com



ABSTRACT

Southeast Asia with a number of Moslem majority countries becomes a concern of international in the development of Islamic Finance. Ability of Islamic Finance Industries in this region in the face of the Asian currency crisis in the late 1990s and the global financial crisis in 2008 showed that the region had an important position in this industry. The achievement was affected by political constellation existed in this region. Politics and economics in the context of Islamic Finance were very important in economic development and Islamic Finance Industry. This paper aimed to discuss about Islamic Financial Industry development and its relationship to political economy in the Southeast Asia. Political economic interest had a close relationship with Islamic Financial Industry in Southeast Asia.

Keywords: Economy, politic, Islamic Finance Industry, Southeast Asia.

PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan ekonomi dan keuangan Islam tidak lepas dari pemikiran ekonomi klasik yang bersifat kebijakan. Kemudian, perkembangan ini semakin pesat pasca berakhirnya Perang Dunia II yang juga menjadi titik tolak pembentukan dasar perbankan Islam. Selain itu, lahirnya banyak pemikir Islam di era kontemporer, seperti Muhammad Nejatullah Muhammad Baqir Ash-Shadr, Muhammad Abdul Mannan, Monzer Kahf, Muhammad Akram Khan, menjadi faktor penunjang yang penting. Masalah-masalah ekonomi kontemporer pun dicoba diselesaikan melalui perpaduan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Secara lokal kebangkitan keuangan Islam ditandai dengan banyak lembaga keuangan Islam tanpa bunga bermunculan, seperti di Malyasia, Pakistan, dan Mesir. (Darsono, 2017: 2)

Perkembangan industri keuangan Islam dunia telah dimulai sejak tahun 1970 sampai 1980-an. Periode dimana industri keuangan Islam mulai muncul yang terbatas pada kebutuhan umat Islam, terutama untuk pembiayaan perdagangan dan modal kerja dengan metode yang masih mereplikasi mekanisme kerja di perbankan konvensional. Lembaga keuangan syariah mulai beragam mulai dari perbankan, asuransi sampai dengan pasar modal. Hal ini mengindikasikan bahwa bentuk industri keuangan Islam mulai terstruktur dengan berbagai macam produk perbankan yang bebas bunga, *leasing*, pasar modal dan asuransi. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri keuangan Islam semakin relevan dalam ekonomi modern sehingga mampu menarik non Muslim yang sedang mencari *ethical investment*. Ekspansi keuangan Islam terus berjalan dimana pada rentang tahun 2000-2010, pangsa usahanya berkembang menjadi lembaga investasi, aset manajemen, broker, dan pasar modal. Dengan kata lain Industri Keuangan Islam telah mampu menjadi industri bernilai tambah tinggi. Selain itu, pada periode ini, industri keuangan Islam telah mampu menawarkan produk yang lebih *sophisticated*, dan bersaing dengan produk konvensional. Kondisi ini telah mendorong industri keuangan untuk terus menjadi efisien dan produktif sebagai lembaga intermediasi. Walhasil, pada rentang waktu ini industri keuangan Islam diakui secara global sebagai *genuine* alternatif pada keuangan modern saat ini. (Darso, 2017: 5)

Dalam kaitannya dengan keuangan Islam dewasa ini, wilayah Asia Tenggara dapat disebut sebagai rumah produksi bagi keahlian dan inovasi (*powerhouse of skill and innovations*), sementara Timur Tengah terutama negara-negara teluk menjadi sumber likuiditas (*pool of liquidity*), artinya bahwa perkembangan dunia perbankan dan keuangan Islam kontemporer mulai bergeser dari Timur Tengah ke Asia Tenggara, bahkan keuangan global bergerak dari Amerika dan Eropa ke Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia. (Agus Irawan, 2014: 132).

Asia Tenggara dengan sejumlah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memang menjadi perhatian Internasional dalam kaitannya dengan perkembangan keuangan Islam. Kemampuan industri keuangan Islam di wilayah ini dalam menghadapi krisis mata uang Asia pada akhir 1990-an dan krisis keuangan global Amerika dan Eropa yang bermula dari 2008-2013, menjadi bukti sekaligus pengakuan bahwa wilayah Asia Tenggara memiliki posisi penting dalam percaturan industri yang berkembang pesat saat ini. (Yuliandriansyah, 2010: 267)

Kinerja perekonomian suatu negara ditentukan oleh banyak faktor dan tiga diantaranya yang paling menentukan adalah: (1) kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang dijalankan pemerintah, (2) lingkungan dimana perekonomian tersebut beroperasi, dan (3) sistem ekonomi politik yang digunakan. Semua faktor-faktor penentu kinerja perekonomian tersebut bisa berubah setiap saat. Jika berbagai kondisi dalam masyarakat berubah, baik itu karena berubahnya cara pandang masyarakat (atau deologi), adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan, norma-norma, atau aturan dan tata hukum, maka sistem ekonomi politik yang dianut suatu masyarakat juga bisa berubah. Tergantung bagaimana kondisi perpolitikan saat itu, perubahan dalam sistem ekonomi bisa berlangsung secara gradual, halus, dan tanpa gejolak, tetapi bisa pula berlangsung secara drastis, radikal, atau revolusioner. (Deliarnov, 2006: 4). Menurut Frans Seda dalam Deliarnov, sistem perekonomian bisa terbentuk melalui berbagai cara. *Pertama*, sistem ekonomi terbentuk karena tradisi turun-temurun, yang tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat untuk kemudian diwariskan pada generasi-generasi sesudahnya. Cara *kedua*, sistem ekonomi terbentuk dari hasil pemikiran seseorang. Misalnya sistem ekonomi kapitalis dibentuk oleh Adam Smith dan kawan-kawan dari mazhab Klasik, sedang sistem ekonomi Sosialis/Komunis dirancang oleh Karl Max, Friedrich Engels, Lenin, dan sebagainya. Cara *ketiga*, sistem ekonomi dibentuk melalui pembaruan. Pembaruan bisa bersumber dari dalam (internal), dan bisa juga dari luar (eksternal). Sebagai contoh, di Eropa berbagai pembaharuan umumnya bersumber dari dalam, sedang di Jepang dipaksakan dari luar, yaitu oleh Amerika Serikat. Cara *keempat*, sistem ekonomi diciptakan secara terencana dalam bentuk “cetak biru” sebagai kerangka pola tindakan guna menghadapi berbagai masalah sosial-ekonomi-politik yang timbul dalam masyarakat. Dari cara berpikir yang disebutkan terakhir ini jelas sekarang bahwa sistem ekonomi sangat ditentukan oleh faktor politik. Lebih jauh Arifin dalam Deliarnov menjelaskan bahwa ideologi yang dianut, tingkat keberdaulatan negara tergantung pada keberdayaan (*workability*) sistem ekonomi dan proses-proses politik. Keberdaulatan negara akan sangat menentukan perjalanan sistem dan kelembagaan ekonomi sesuai dengan pola interaksi dan keterkaitan antara pemerintah sebagai penyelenggara negara, sektor swasta sebagai pelaku ekonomi, dan masyarakat madani sebagai pengusung nilai-nilai yang dianut dalam suatu negara. (Deliarnov, 2009: 5-6)

Lahir dan berkembangnya sistem keuangan Islam di Asia Tenggara juga dipengaruhi oleh unsur politik yang ada di wilayah tersebut, salah satunya adalah untuk mengatasi berbagai masalah sosial-ekonomi-politik yang dihadapi oleh negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. Paper ini bertujuan untuk membahas tentang perkembangan Industri Keuangan Syariah di Asia Tenggara dan hubungannya dengan ekonomi politik yang ada di negara-negara di wilayah Asia Tenggara.

DEFINISI EKONOMI POLITIK

Ekonomi politik adalah sebuah studi tentang masalah dasar dalam teori sosial dengan menggunakan pendekatan hubungan antara politik dan ekonomi. Ekonomi politik menggunakan berbagai pendekatan, membahas banyak topik dan melintasi berbagai disiplin ilmu. Lebih jauh ekonomi politik merupakan kajian yang komprehensif, membahas banyak segi, dan bersifat interdisipliner, tidak hanya melibatkan ilmu ekonomi dan politik, tetapi kadang-kadang juga ilmu sosial, budaya, hukum dan psikologi. Sayangnya, semakin hari persoalan yang dihadapi semakin rumit karena aktivitas pembangunan teori menjadi lebih rumit dikarenakan keterlibatan pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Hal ini merupakan salah satu dampak dari pendapat ekonom Keynesian yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam perekonomian sehingga peran politik dalam perekonomian semakin luas dan teori ekonomi tidak lagi tertutup untuk variabel-variabel politik. (Deliarnov, 2006: 10)

Choudry dalam Mohd Syakir, menjelaskan definisi ekonomi politik dari sudut pandang Islam bahwa ekonomi politik Islam merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara pemerintah dan sub sistem pasar. (Mohd Syakir, 2015: 3). Lebih jauh Choudry menjelaskan bahwa teori ekonomi politik merupakan teori yang diturunkan dari Al-Qur'an. Ekonomi politik Islam memperlihatkan sistem yang interaktif, integratif, dan evolusioner yang mengkombinasikan antara ilmu dan moral yang menekankan pada keberkahan, keadilan, Cinta dan Kasih Sayang. (Choudry, 2008:65)

ISLAM DI ASIA TENGGARA

Secara umum masuknya Islam di Asia Tenggara adalah melalui peroses perdagangan Internasional yang berpusat di Selat Malaka melalui para pedagang Muslim Persia dan Arab. Kemudian melalui pernikahan, baik antara para pedagang lokal, maupun antara pangeran dan puteri raja, pengislaman raja dan golongan bangsawan, penyiaran oleh para mubaligh, serta peranan pusat kebudayaan yang berfungsi sebagai pusat keilmuan dan penyebaran Islam di Perak, Riau, dan Aceh.

Sesuai dengan perkembangannya, Islam berafiliasi dari satu negara ke negara lain di Asia Tenggara. Secara signifikan, Islam telah memberikan pandangan hidup baru bagi penduduk Asia Tenggara. Proses masuknya Islam di negara-negara bagian Asia Tenggara tidak sepenuhnya sama, sesuai dengan karakteristik dan budaya masing-masing negara. Islam, baik Islam Arab dan Islam Persia, datang ke Asia Tenggara tidak serta merta menghiangkan budaya atau lokalitas penduduk. Di Malaysia, misalnya, tradisi Islam Arab sudah mulai merebah Malaysia sehingga ajaran keislamannya hampir mirip dengan Islam Arab.

Di Indonesia sendiri, perkembangan Islam sudah sejak lama mempengaruhi segala bentuk kebijakan pemerintahan di Indonesia. pada masa Kolonialisme, Sarikat Islam adalah oraganisasi pertama yang dibentuk untuk menyatukan para pedagang –pedagang Islam demi menekan penyebaran agama Krisen, yang dianggap sebagai mobilisasi dalam perlawanan kepada penjajah.

Berbeda dengan Islam di Indonesia, Islam di Malaysia dijadikan sebagai suatu identitas sendiri meskipun kebebasan beragama masih dijunjung tinggi. Hal ini berkaitan dengan kesultanan Malaysia yang sebagian besar beragamaan Islam.

Mayoritas Islam di Indonesia dan Malaysia tidak dialami oleh Thailand, yaitu di Thailand Selatan. Mulai dari abad ke-13 dimana Agama Islam menapakkan kakinya di kerajaan Pattani dan kemudian menjadi mayoritas di wilayah tersebut. Ketika modernisasi merambah semua negara, Thailand menjadi negara demokrasi, muslim Thailand mulai dipandang positif oleh komunis lainnya. Hal ini memunculkan era baru antara muslim-pemerintah yang memberikan ruang lebih luas bagi umat muslim Thailand merambah dunia politik dan ekonomi.

PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN KEUANGAN ISLAM DI MALAYSIA

Malaysia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan pemeluk agama yang beragam, terdiri dari Muslim 58 persen, Hindu 8 persen, Kristen 24 persen dan lainnya 10 persen. Namun demikian, agama resmi negara adalah Islam. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia mempunyai kewajiban untuk mengakomodasi pengembangan lembaga keuangan syariah di Malaysia sesuai dengan agama Islam yang dianut negara dan mayoritas rakyatnya. Atas dasar tersebut Malaysia mulai menerapkan *dual economic system* dan mengembangkan sistem keuangan dan perbankan syariah sejak 1983.

Malaysia adalah negara yang menerapkan sistem keuangan dan perbankan ganda (*dual financial and banking system*) mulai tahun 1983 ketika dikeluarkannya undang-undang perbankan syariah pada tahun 1983 dan undang-undang asuransi syariah pada tahun 1984. Sejak saat itu lembaga keuangan syariah beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional.

Mayoritas penduduk Muslim Malaysia menganut *madzhab* (*school of thought*) Syafi'i. Meskipun memiliki *madzhab* yang sama dengan mayoritas Muslim Indonesia, aplikasi penerapan prinsip Syariah dalam dunia perbankan dapat berbeda, tergantung pada pemahaman dan pendapat ulamanya. Misalnya, menurut pendapat ulama Malaysia aliran dana sama dengan hutang dan juga sama dengan harta benda (*cashflow = debt = property*). Oleh karena hutang sama dengan harta benda, maka hutang dapat dijualbelikan dengan harga berapa pun. Sebagai contoh, piutang senilai Rp 1000 dapat dijual dengan harga diskon senilai Rp 800. Pendapat dengan prinsip ini berimplikasi pada akad dari produk dan instrumen keuangan syariah yang digunakan di Malaysia, seperti dibolehkannya *Bai' Al-Inah* (*sale and buyback*) dan *Bai' Al-Dayn* (jual beli hutang dengan diskon).

Bank syariah di Malaysia berada di bawah undang-undang yang berbeda tergantung dari bentuk institusinya. Bank syariah penuh (*full fledged Islamic bank*) berada di bawah undang-undang perbankan syariah atau *Islamic Banking Act* yang diterbitkan tahun 1983. Sementara itu, *Islamic windows* atau bank konvensional yang menawarkan produk-produk perbankan syariah berada di bawah undang-undang perbankan konvensional. Dengan perbedaan undang-undang yang mengaturnya, operasi *full fledged Islamic bank* menjadi lebih leluasa daripada *Islamic windows* terutama dalam penerapan ketentuan-ketentuan Syariah.

Otoritas syariah tertinggi di Malaysia berada pada NSAC yang didirikan pada 1 Mei 1997 dan berada dalam struktur organisasi Bank Negara Malaysia (BNM). Anggota NSAC ditunjuk oleh dewan direktur (*board of directors*) BNM untuk masa kerja tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Dalam hal strategi pengembangan perbankan syariah dan produk-produknya, Malaysia memilih pendekatan komprehensif dan pragmatis. Berbagai produk dan instrumen keuangan syariah di Malaysia populer menggunakan akad atau mengandung unsur *Bai' Al-Inah* dan *Bai' Al-Dayn*. Dengan menerapkan kedua akad ini, produk dan instrumen keuangan syariah dapat menyerupai produk dan instrumen keuangan konvensional. Apabila di perbankan konvensional ada kartu kredit, maka di perbankan syariah ada kartu kredit Syariah. Apabila di perbankan konvensional ada fasilitas *overdraft*, maka di perbankan syariah ada *overdraft* Syariah. Apabila di perbankan konvensional ada instrumen pasar uang jangka pendek, maka di perbankan syariah ada instrumen pasar uang syariah jangka pendek. Demikian seterusnya, sehingga hampir semua produk dan instrumen keuangan konvensional selalu ada padanannya pada produk dan instrumen keuangan syariah.

PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beragam suku bangsa, bahasa, dan agama dengan jumlah penduduk 240 juta. Meskipun bukan negara Islam, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 88 persen, Kristen 5 persen, Katolik 3 persen, Hindu 2 persen, Budha 1 persen, dan lainnya 1 persen. Semakin majunya sistem keuangan dan perbankan serta semakin meningkatnya kesejahteraan, kebutuhan masyarakat, khususnya Muslim, menyebabkan semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Mulai tahun 1992, setelah dikeluarkannya undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 Indonesia mulai memperkenalkan sistem keuangan dan perbankan ganda karena bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Penerapan sistem keuangan dan perbankan ganda mulai lebih terarah semenjak dikeluarkannya undang-undang perbankan yang baru no. 10 tahun 1998. Semenjak itu, bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional.

Mayoritas penduduk Muslim Indonesia menganut *madzhab (school of thought)* Syafi'i, seperti yang dianut oleh Muslim dan pemerintah Malaysia. Namun demikian, ulama Indonesia mengaplikasikan prinsip Syariah dalam dunia perbankan dengan hati-hati dan cenderung memiliki pendapat yang sama dengan ulama Timur Tengah. Dalam hal hutang, ulama Indonesia berpendapat sama dengan pendapat ulama Timur Tengah bahwa hutang sama dengan uang (*debt = money*), bukan harta benda (*debt ≠ property*). Dengan demikian, hutang tidak dapat diperjualbelikan dengan harga berapa pun, kecuali dengan harga yang sama. Dalam hal ini ulama Indonesia sependapat dengan ulama Sudan bahwa akad *Bai' Al-Inah (sale and buyback)* dan *Bai' Al-Dayn* (jual beli hutang dengan diskon) tidak sesuai dengan prinsip Syariah sehingga tidak boleh digunakan dalam transaksi.

Bank syariah di Indonesia, baik yang berbentuk bank umum syariah atau BUS (*full fledged Islamic bank*), unit usaha syariah atau UUS (*full branch Islamic bank*), maupun bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS, berada di bawah undang-undang perbankan (UU No.10 Tahun 1998).

Otoritas syariah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah Syariah agama Islam, baik masalah *ibadah* maupun *muamalah*, termasuk masalah ekonomi, keuangan, dan perbankan.

Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Dan Produknya Indonesia memilih pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan (*gradual and sustainable*) yang sesuai Syariah (*comply to Sharia principles*) dan tidak mengadopsi akad-akad yang kontroversial.

PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN KEUANGAN ISLAM DI BRUNEI

Bank Islam pertama di Brunei berdiri pada tahun 1992 dengan nama Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB). Bank itu didirikan atas dasar pemikiran bahwa menyediakan institusi bank Islam adalah fardhu kifayah demi melayani komunitas muslim yang ada di Brunei. Awalnya, fungsi utama TAIB adalah menyediakan fasilitas untuk umat muslim yang ingin menunaikan haji ke Mekkah. Hingga tahun 2001, baru terdapat 2 bank Islam yaitu TAIB dan IBB (Islamic Bank of Brunei) yang dikonversi dari bank konvensional yang bernama International Bank of Brunei pada tahun 1993, sedangkan sisanya beroperasi dengan sistem konvensional.

PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN KEUANGAN ISLAM DI SINGAPURA

Monetary Authority of Singapura (MAS) bertujuan untuk mengembangkan keuangan Islam di Singapura dengan memanfaatkan kekuatan yang ada di perbankan, pembiayaan perdagangan, manajemen kekayaan, asuransi dan pasar modal. Sebagai pusat keuangan internasional di Asia, lembaga keuangan yang berbasis di Singapura harus mampu menawarkan paket lengkap dari produk dan jasa keuangan, termasuk dari keuangan Islam.

Sejak 1998, jasa keuangan Islam telah tersedia melalui *Islamic Window* pada bank tertentu di Singapura. Pada tahun 2005, MAS menyempurnakan peraturannya untuk memfasilitasi pertumbuhan keuangan Islam. Singapura juga menghapus bea materai tambahan untuk transaksi syariah tertentu yang melibatkan real estate. Untuk berkontribusi pada pengembangan keuangan Islam, MAS bergabung dengan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) dan telah berpartisipasi aktif dalam berbagai kelompok kerja dan gugus tugas di daerah seperti pengawasan review, pasar uang syariah, kecukupan modal, manajemen likuiditas dan solvabilitas persyaratan untuk operasi takaful.

Tahun 2006, klarifikasi dilakukan pada perlakuan pajak untuk keuangan Islam menggunakan Murabahah, Mudharabah dan struktur Ijarah wa Iqtina. Bank berbasis di Singapura mulai menawarkan investasi Murabahah dan pembiayaan Murabahah. Pada tahun 2007, investor ritel Murabahah yang diberikan perlindungan peraturan sama seperti deposito konvensional.

Tahun 2008, tarif pajak konsesi diperkenalkan untuk kualifikasi pinjaman syariah, pengelolaan dana, takaful dan kegiatan reasuransi syariah. Tahun 2009 diluncurkan fasilitas Sukuk MAS untuk membantu memenuhi persyaratan peraturan dan likuiditas untuk lembaga keuangan yang berbasis di Singapura. Pada bulan Mei, MAS yang diterbitkan pedoman pada penerapan peraturan perbankan untuk keuangan Islam dan peraturan baru yang memungkinkan bank untuk melakukan Murabahah penempatan antar bank, Ijarah, pembiayaan Musyarakah dan tempat Murabahah. Singapura juga menjadi tuan rumah KTT IFSB ke-6 yang dihadiri oleh lebih dari 300 delegasi dari Asia dan Timur Tengah.

Selama beberapa tahun, banyak lembaga keuangan telah memperkenalkan jenis produk syariah. Termasuk bank seperti Standard Chartered Bank, HSBC, OCBC, CIMB dan Maybank.

Pada tahun 2007, Singapura meluncurkan bank pertama dengan konsep fully Islamic bank – Islamic Bank of Asia, yang merupakan joint venture antara bank DBS dan investor swasta Timur Tengah. Lembaga keuangan Islam lainnya seperti Arcapita, Al Salam Bank Bahrain dan AEP Investment Management (AEP) telah mendirikan kantor di Singapura. Asuransi HSBC telah mengelola dana takaful untuk pasar domestik, sementara Tokio Marine reasuransi syariah telah didirikan di Singapura sejak tahun 2004 untuk melayani wilayah tersebut.

PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN KEUANGAN ISLAM DI FILIPINA

Filipina adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen yaitu sekitar 80%, sedangkan jumlah penduduk muslimnya berjumlah 8,5%. Pada tahun 1565, Filipina dibawah kekuasaan Spanyol. Muslim Filipina dikenal sebagai Moros oleh pihak berwenang Spanyol, atau atau mengacu pada sebutan orang Moor yang ada di Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan Filipina ke Amerika Serikat berdasarkan Perjanjian Paris. Pada tahun 1946, Republik Filipina, masyarakat Moros terlibat dalam konflik dengan pemerintah Filipina mengenai status politik mereka. Pada tahun 1978, Otoritas Haji Filipina didirikan dan pada tahun 1981, Departemen Urusan Islam didirikan. Pemerintah Filipina mempertimbangkan kemungkinan pengenalan bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk menyediakan layanan perbankan kepada seluruh penduduk Muslim, terutama di wilayah selatan Mindanao.

Bank Islam pertama di Filipina yaitu Philippine Amanah Bank (PAB) yang berdiri tanggal 2 Agustus 1973 sebagai institusi pemerintah khusus yang dibentuk oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos dengan modal sebesar 100 juta peso. Perwujudan PAB adalah sebagai tanggapan terhadap pemberontakan oleh umat Islam di Filipina selatan, di mana pendirian bank ini adalah untuk memenuhi kebutuhan spesifik umat Islam. PAB ini ditujukan untuk memulihkan

dan membangun Filipina Selatan dari pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok muslim di daerah tersebut. Namun, PAB tidak beroperasi penuh sebagai bank syariah pada saat awal berdiri. PAB mengoperasikan dua windows untuk transaksi konvensional dan Islam. Yang menonjol dari produk PAB adalah penggunaan skema profit and loss sharing (PLS) adalah Penyisihan Tabungan Jemaah Khusus (*Pilgrims Special Saving Deposit /PSSD*) yang dirancang untuk memobilisasi tabungan dan mengumpulkan dana umat Islam yang ingin berhaji untuk diinvestasikan dalam perdagangan, perdagangan dan industri halal dalam Islam. Rekening PSSD telah benar-benar terpisah dari rekening bank yang berbunga. Deposito yang dihasilkan dari program ini mencapai P883 juta pada tanggal 30 Juni 1983 dan menghasilkan tingkat keuntungan sebesar 10,2 persen pada paruh pertama tahun 1983, yang melampaui tingkat pengembalian pada rekening tabungan reguler. (Mohammad Taqiuddin Mohamad, dkk, 2013:7)

Pada tahun 1990, berdasarkan Undang-Undang negara Filipina No. 6848, Philippine Amanah Bank (PAB) berubah nama menjadi Charter of Al-Amanah Islamic Investment Bank of the Philippines (AAIIBP). Hingga kini, Al-Amanah Islamic Investment Bank merupakan bank syariah pertama dan satu-satunya di Filipina dan tahun ini bank tersebut telah berdiri selama 44 tahun. (www.amanahbank.gov : 2017).

PENUTUP

Industri Keuangan Syariah di Asia Tenggara mengalami perkembangan yang pesat dan stabil hal ini membuktikan bahwa Asia Tenggara memiliki posisi yang penting bagi keuangan global dalam dunia Islam. Selain itu, sejumlah negara di Asia Tenggara mayoritas penduduknya Islam, menjadikan Asia Tenggara selalu dilibatkan dalam pembahasan isu perkembangan keuangan Islam Internasional. Terlebih wacana keuangan merupakan salah satu diskursus global yang selalu menggairahkan. Hal ini menjelaskan bahwa kepentingan politik tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara khususnya pertumbuhan dan perkembangan industri Keuangan syariah di Asia Tenggara.

DAFTAR RUJUKAN

- Amalia Jihad, Azka. 2016. *Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan Pendekatan Shari'ah Maqasid Index*. Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga.
- Andriansyah, Yuli. 2010. Book Review Current Issues In Islamic Banking and Finance in South East Asia. *Jurnal Lariba*. (Online), volume 4, No.2, (<http://yuliandriansyah.staff.uui.ac.id/files/2012/04/laribavol4n02artikel8-andriansyah-isu-terkini-industri-perbankan.pdf>, diakses 5 September 2017)
- Asutay, Mehmet. 2007. *A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understandings For an Alternative Economic System*. Jepang: Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies.
- Choudhury, Masudul Alam. 2008. Global ethics in the light of Islamic Political Economy. *Int. J. Arab Culture, Management and Sustainable Development*, Vol. 1, No. 1.
- Darsono, dkk. 2017. *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Rosdi, Mohd Syakir Bin Mohd. 2015. Conceptualization of Islamic Political Economy. *American International Journal of Social Science*, Vol. 4, No. 4.

- Solihin, dkk. 2016. The Islamic Banking And The Economic Integration In ASEAN. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 19, Nomor 1.
- Stuart Mill, John. 2009. *Principles of Political Economy*. Newyork: D Appleton And Company.
- Sejarah Amanah Bank Filiphina, (<http://www.amanahbank.gov.ph/about-the-bank/history>, diakses pada 20 September 2017)
- Taqiuddin Mohammad, dkk. 2013. The Historical Development Of Modern Islamic Banking: A Studi In South-East Asia Countries. *African Journal of Business Management*. (online), (<http://www.academicjournals.org/AJBM>, diakses pada 20 September 2017)